

Pembangunan Berbasis Demokrasi dan Agama

Regita Cahya Karima
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Regitaaya@gmail.com

Suggested Citation:

Karima, Regita Cahya. (2023). Pembangunan Berbasis Demokrasi dan Agama. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 1: 175-180. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i1.24376>

Article's History:

Received March 2023; Revised March 2023; Accepted March 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This article aims to critically review part of the book "Palgrave Advances in Development Studies," namely the article Part 1 changing notions of development: bringing the state back in" Peter Calvert wrote in 2005. This book discusses the concept of a developmental state experiencing revival. At the same time, the Third Wave of democratization took place, which provided a more secure base than many had previously thought. Even though it was difficult, the Third Wave persuaded the government to create a democratic government to promote economic growth.

Keywords: *third wave; developing countries; Islamic development; democratization; globalization*

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk memberikan *critical review* terhadap bagian buku "Palgrave Advances in Development Studies," yaitu artikel *Part 1 changing notions of development: bringing the state back in*" ditulis oleh Peter Calvert tahun 2005. Buku ini membahas konsep negara pembangunan yang hingga saat ini sedang mengalami kebangkitan. Pada saat yang sama terjadi perubahan *Gelombang Ketiga* demokratisasi, yang memberikan dasar lebih aman daripada yang diperkirakan sebelumnya oleh banyak orang. Sekalipun tidak mudah, *Gelombang ketiga* membujuk pemerintah, untuk menciptakan pemerintah demokratis, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: gelombang ketiga; negara pembangunan; pembangunan Islam; demokratisasi; globalisasi

PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah *review* atas artikel Calvert, P. (Calvert, 2005) *Changing notions of development: bringing the state back in* dalam buku suntingan Jeffrey Haynes (2005) *Palgrave Advances in Development Studies*, 47-64. ISBN 1-4039-3512-2.

Selama 1980-1990-an kegagalan reformasi ekonomi negara-negara berkembang menjadi bahan perdebatan. Dari perdebatan tersebut melahirkan sebuah argumen bahwa ketidakberhasilan reformasi ekonomi tidak dapat dipungkiri, disebabkan oleh pengaruh eksternal dan internal. Pengaruh faktor-faktor eksternal seperti: *US Agency for International Development* (USAID), Bank Dunia dan IMF. Sedangkan, pengaruh internal di antaranya melalui keinginan pribadi yang kuat. Namun, terdapat faktor-faktor penghambat keinginan pribadi di antaranya seperti; kurangnya industri dan infrastruktur, melek huruf yang rendah, pendidikan buruk, partisipasi sekolah yang rendah, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat, hingga konflik sosial yang serius. Pada akhirnya, semua persoalan itu berada di tangan kompetensi

suatu negara untuk membuatnya menjadi lebih baik atau buruk. Fakta yang terjadi adalah negara memiliki kemampuan yang tidak dapat diragukan dengan menggunakan argumen: *Negara mengerahkan segala kemampuan untuk membuat pembangunan menjadi lebih baik*. Oleh karena itu, tujuan penulisan Bab ini adalah untuk mengetahui: "*Pentingnya sejarah dan urgensi Negara Demokratis dalam melakukan pembangunan*."

Pemerintahan demokratis memiliki cakrawala waktu sangat singkat. Inti dari pembangunan ekonomi yang efektif adalah alokasi sumber daya untuk jangka panjang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Sebagai tambahan, semua pemerintah saat ini menderita defisit demokrasi karena mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil menjadi tawanan kekuatan ekonomi di luar kendali mereka (seperti globalisasi). Namun pengalaman negara-negara demokratis adalah mereka lebih berhasil dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mempertahankan proses pembangunan itu daripada bentuk pemerintahan lainnya. Hasil review terhadap buku ini adalah: 1) review aspek teoritis, menghasilkan: Teori yang mendukung konsep yang dikemukakan Max Weber (etika Protestan dan spirit kapitalisme) (Weber, 2002). Teori ini menganggap agama atau kepercayaan terhadap agama memiliki peran khusus dalam mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi.

GARIS BESAR ISI BUKU

Bagi sebagian banyak orang, istilah pembangunan masih terdengar *samar*. Bahkan istilah pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Namun, beberapa orang lain berpandangan bahwa pembangunan ekonomi bukanlah hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan individu. Konsep pertumbuhan individu di dunia ini (yang sudah terkena dampak globalisasi) dianggap tidak terlalu jelas, karena semua proses ekonomi saat ini sudah tunduk bahkan patuh pada pengaruh dan gangguan dari luar batas negara. Penjelasan mengenai mengapa pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di beberapa negara, dan tidak di negara-negara lainnya? Setidaknya keputusan alasan pertimbangan faktor eksternal dan internal merupakan alasan yang menjadi bahan pertimbangan sejak Perang Dunia II.

Max Weber menjelaskan tentang bagaimana pembangunan terjadi di suatu negara dan tidak terjadi di negara lain. Dalam Esainya yang berjudul "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*", ia berpendapat bahkan menganggap bahwa agama atau kepercayaan terhadap agama memiliki peran khusus dalam mendorong ataupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Gagasan Max Weber, agama memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan, dikaitkan dengan Islam yang mendorong penganutnya untuk bersikap *fatalistic* dan tidak menganut nilai-nilai anti materialistis. Sebagai contoh, terjadi kecaman dari semua umat Muslim terhadap semua pinjaman yang menggunakan bunga. Menurut Weber hal tersebut terbukti sebagai penjelasan keterbelakangan ekonomi pada negara-negara Arab di Timur Tengah (Rahman, 2021).

Menurut *Newly Industrialising Economies (NIEs) of Asia and by the 'cepalistas' in Latin America (who derived their nickname from the Spanish acronym for the United Nations Economic Commission for Latin America: CEPAL; now CEPALC)* menganggap, peran penting negara dalam mengelola industri sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditentukan, dengan tujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang sistematis dan sukses di tangan pemerintah. Negara harus menjadi *bankir* yang menyediakan investasi secara selektif, di mana pada sektor ini investor luar negeri tidak mau melakukannya.

Walt Rostow (W W Rostow, 1960), seorang ahli sejarah ekonomi US, berpendapat: Negara dengan ekonomi maju harus dipisah dengan negara yang tingkat ekonominya masih berkembang. Sebelum keduanya *take-off* atau lepas landas, di mana segala hal saat terbang mungkin terjadi, bagaimanapun, tiga hal yang harus dimiliki adalah: 1) Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan, 2) akumulasi modal yang diperlukan serta control dan dukungan dari elit politik untuk pembangunan, dan 3) seperti yang diungkapkan dalam '*convergence theorists*', bahwa semua masyarakat industri adalah sebuah tahap untuk membangun masyarakat post-industrial (Giddens et al., 2004).

Salah satu contoh paling awal, Ghana, menunjukkan bahwa terlalu mudah bagi ambisi untuk mengalahkan kinerja. Uang yang diinvestasikan untuk jalan raya, maskapai penerbangan, kapal laut, dan sejenisnya sering kali terbuang percuma karena infrastruktur tidak ada yang menggunakannya

secara produktif. Setelah 1975 ekonomi Meksiko menjadi semakin didominasi oleh produksi minyak bumi dan gagal menjadi pemain utama di panggung dunia.

Argentina, menurut Walt Rostow (Walt Whitman Rostow, 1991), telah berada di titik *lepas landas* pada 1930 tetapi gagal mencapai pertumbuhan yang mandiri, sementara Brasil, dengan semua keuntungannya yang jelas dalam hal sumber daya yang melimpah, terus menderita karena tingkat pertumbuhan yang tinggi. Fakta bahwa sumber daya ini terkonsentrasi di beberapa negara otoriter, yang dikendalikan oleh elit kecil, secara fatal melemahkan daya tawar individu mereka.

Hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan kegagalan, Myrdal (Myrdal, 1968) mengasumsikan bahwa semua negara bagian di inti akan menjadi negara yang kuat, dan semua di pinggiran akan menjadi lemah – yaitu, apa yang Myrdal sebut sebagai *keadaan lunak*: dengan tidak satu pun dari mereka memiliki kapasitas maupun keterampilan politik untuk melaksanakan proyek pembangunan mereka.

Sejak 1989, tren dan perkembangan internasional dirangsang oleh peristiwa-peristiwa yang terkait dengan berakhirnya Perang Dingin, telah membangkitkan kekhawatiran tentang dampak globalisasi terhadap negara-negara berkembang. Hal ini pada gilirannya telah membantu merangsang pemeriksaan ulang mendasar dari proses perkembangan. Di banyak negara berkembang, hal ini disertai dengan penemuan kembali gagasan mengenai *negara berkembang*.

Istilah *negara berkembang* tampaknya berasal dari studi Chalmers Johnson (Johnson, 1999) tentang Jepang dalam tiga puluh tahun perkembangan pesat pascaperang. Kemudian, diperluas ke negara-negara industri baru lainnya di Asia, dalam prosesnya menjadi model untuk pengembangan berlangsung di beberapa negara, termasuk Thailand dan Indonesia.

Ide negara pengembangan atau pembangunan memiliki dua komponen: *Pertama*, struktural (negara berkembang diatur untuk mendorong pembangunan ekonomi, akumulasi dan industrialisasi). *Kedua*, ideologis, ia memiliki misi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dalam sistem produktif, baik di dalam negeri maupun di hubungannya dengan ekonomi internasional (Castells, 2010).

Model tersebut nampaknya dapat diterapkan pada berbagai masyarakat dan negara bagian di Asia Timur dan Tenggara; tidak hanya ke Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, tetapi pada tingkat lebih rendah ke negara *harimau kecil*: Singapura, Malaysia dan Hong Kong. Mereka tidak hanya terbukti berhasil, tetapi dengan sukses, ciri-ciri mereka yang lebih otoriter diredam, dan dalam banyak kasus, kekayaan yang lebih besar disertai dengan demokratisasi yang substansial (Aubert, 2012).

Oleh karena itu, teladan mereka membantu mewujudkan tuntutan populer di tempat lain untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang lebih baik, yang memengaruhi banyak negara berkembang lainnya. Hal ini pada gilirannya menyebabkan perubahan politik dan ekonomi domestik yang dramatis di bagian negara berkembang. Ini termasuk: reformasi ekonomi ke arah ekonomi pasar, demokratisasi, dan menyerukan hak asasi manusia yang lebih baik, terutama bagi perempuan dan minoritas (Rahman, 2018).

Bagaimana negara dapat disusun dengan sebaik-baiknya untuk mendorong hasil-hasil pembangunan yang menguntungkan? Apakah cukup untuk memenuhi standar minimum tertentu dari pemerintahan yang baik? Atau apakah sistem demokrasi yang berjalan merupakan kondisi yang diperlukan untuk pembangunan yang maju?

Perkembangan Jepang dan *Macan* lainnya terjadi, harus diingat, tepat pada (1945-1975) pertumbuhan ekonomi yang pesat juga terjadi di Amerika Serikat, Jerman, Prancis dan negara-negara industri maju lainnya. Ada empat aspek utama negara demokrasi yang tampaknya berhasil dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan standar hidup yang tinggi bagi warganya yakni:

Pertama, Keadilan Peradilan. Negara-negara perdagangan yang sukses berabad-abad yang lalu menyadari pentingnya peradilan yang tidak memihak untuk memutuskan perselisihan antara para pedagang dan untuk mendengar banding dari pelanggan yang percaya bahwa mereka telah menjadi korban malpraktik. Hanya negara yang kuat yang dapat menjamin pasar bebas.

Kedua, Pemerintahan yang Bagus. Terlalu banyak uang yang dimajukan oleh IMF menghilang ke dalam 'lubang hitam' dengan sangat sedikit untuk ditunjukkan. Lebih buruk lagi, beberapa negara jelas telah mengembangkan ketergantungan seperti obat bius pada subsidi lebih lanjut, berjanji setiap waktu untuk memenuhi kewajiban mereka di lain waktu dan pasti gagal melakukannya. Oleh karena itu, gagasan 'pemerintahan yang baik' muncul untuk menggambarkan serangkaian persyaratan administratif untuk sukses.

Ketiga, Akuntabilitas Demokratis. Cara yang jelas untuk mencapai beberapa tujuan teknis pemerintahan yang baik adalah melalui penciptaan mekanisme akuntabilitas demokratis. Negara-negara otoriter telah berulang kali mengklaim legitimasi karena kemampuan mereka untuk mengarahkan pembangunan ekonomi, dan pada suatu waktu klaim angkatan bersenjata untuk kompetensi khusus dalam hal ini dianggap remeh. Dalam kasus Korea Selatan, langkah pertama menuju evolusinya menjadi ekonomi industri baru (NEE) diambil di bawah kediktatoran militer General Park. Tetapi dengan meningkatnya kemakmuran, tekanan untuk gerakan terkendali ke pemerintahan demokratis menjadi tak tertahankan, dan bagaimanapun juga pengalaman telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dicapai di bawah sistem otoriter, karena kurangnya akuntabilitas dari elit yang biasanya tertutup memungkinkan tumbuhnya perilaku mencari rente dan korupsi yang tidak terkendali.

Keempat, Stabilitas Politik. Isu keempat – stabilitas politik – sulit untuk dinilai. Tentu saja pembangunan adalah produk dari kegiatan ekonomi. Sebelum pembangunan dapat berlangsung, maka kondisi struktural dan prosedural harus ada agar arena kegiatan ekonomi, pasar, ada dan berfungsi secara efektif. Hal ini membuat demokrasi menjadi sistem yang jauh lebih andal, bahkan jika sering terjadi pergantian pemerintahan membatasi kemampuan untuk merencanakan jangka panjang. Namun definisi demokrasi yang minimalis, memilih pemimpin politik melalui proses pemilu yang diperebutkan, tidaklah cukup. Bahkan di negara-negara maju dengan sejarah panjang kontestasi demokrasi, proses politik terlalu sering menimbulkan demagog, atau, setidaknya, populis yang tersapu ke tampuk kekuasaan oleh daya pikat belaka dari solusi sederhana. Oleh karena itu, secara institusional, demokrasi yang stabil membutuhkan pemilihan umum yang dapat diprediksi, sistem pemilihan yang adil dan sejumlah partai politik berbasis luas yang terbatas di mana para pemimpin dapat direkrut dan dilatih.

KAJIAN KRITIS ATAS BUKU

Isu kebangkitan Indonesia sebagai pendatang baru dalam kalangan pemain utama di tingkat global dan kawasan masih kontroversial. Terlepas dari kondisi ekonominya yang masih rentan gejolak akibat pengaruh perkembangan dalam dan luar negeri. Indonesia, tidak bisa disepelekan kehadiran dan perannya. Faktor-faktor geografis, seperti letaknya yang sangat strategis, di antara dua benua (Benua Asia dan Australia), dan dua samudera (Pasifik dan Hindia), jumlah penduduk ke empat terbanyak di dunia, dan diliputi kekayaan sumber daya alam merupakan faktor yang memungkinkan Indonesia untuk menjadi negara maju. Masalahnya, tinggal bagaimana Pemerintah Indonesia dapat memimpin, mengelola dan mengendalikan negeri ini.

Banyak yang menilai China bagus dalam ekonomi. China menggunakan sistem otoriter, tetapi kebijakan ekonomi pemerintah China itu sangat pro pada rakyatnya. Sementara Indonesia dengan sistem ekonomi *liberalisme ugal-ugalan* yang nyatanya hasnya menguntungkan *elite kakap* saja. Kebijakan ekonomi China telah berhasil mengurangi ratusan juta penduduk miskin dalam waktu 10 tahun, pada tahun 1970 pendapatan rakyat China hanya 50 Dollar / kapita. Indonesia berada diposisi 2x China pada saat itu (100 Dollar / kapita). Dan hari ini pendapatan rakyat China 3x pendapatan rakyat Indonesia. Kekuatan ekonomi China kini nomor dua di dunia. Jadi, kebijakan ekonomi China yang memanfaatkan negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu tidak ada di Indonesia. Malah yang terjadi Indonesia mencontoh system politiknya yang otoriter, karena penguasa berpikir '*semakin otoriter, makin gampang*'. Pertanyaannya, makin gampang untuk apa? Untuk membangun apa untuk KKN?

Mungkin jika pemerintah tidak ada prestasi dan menggunakan sistem demokrasi maka dapat diramal umurnya akan pendek, namun pada kenyataannya, ini bisa diperpanjang, jika ia semakin otoriter, maka akan bertambah usia kekuasaannya. Tapi di lain pihak, menambah resiko, karena semakin otoriter, semakin tidak baik-baik suatu negara. Jika ingin meniru keberhasilan China, maka kebijakan ekonomi perlu pro rakyat kecil bukan pro asing atau elite tertentu. Namun perlu juga melihat negara lain seperti Jepang yang menggunakan sistem demokrasi selama 20 tahun atau sejak PD II namun ekonominya berhasil tumbuh 14%.

Sementara prinsip pembangunan ekonomi dalam Islam menurut Syamsuri (Dosen Ekonomi Islam UNIDA Gontor) dilandasi tiga pilar (Syamsuri & Moka, 2021), yaitu: 1) Tauhid. Islam adalah agama yang sangat sempurna, mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, termasuk pada aspek pembangunan. Berkaitan dengan *Tauhid*. Kita sebagai umat Islam telah sadar dan paham bahwa tauhid, baik *rububiyah*,

asma wa sifat maupun *uluhiyah*. Ketika kita sebagai pelaku ekonomi, dalam bidang apapun menyadari konsep tauhid tersebut. Maka, yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tauhid dapat membawa perubahan ke dalam perilaku, termasuk dalam aktivitas ke-ekonomian. Sebagai contoh: sifat *Ar-Razaq*, yaitu Allah adalah satu-satunya sang pemberi Rezeki. Ketika kita bekerja, bukan berarti hasil dari jerih payak kita, akan tetapi, kita harus yakin adanya kekuatan Allah SWT yang memberikan rezeki kepada hambaNya, sesuai dengan kehendak-Nya. 2). Khalifah, konsep ini membawa arti bahwa kita diciptakan ke muka bumi adalah untuk menjadi wakil. Kalau menjadi wakil, utusan di muka bumi. Kita harus memiliki nilai-nilai yang mana pembangunan tersebut harus dilestarikan dan dimanfaatkan, bukan hanya bagi kita sendiri tetapi juga pada generasi yang akan datang. Itulah makna dari khalifah, jadi bukan hanya sekedar kita memperkaya diri sendiri, sekedar memperhatikan aspek materi saja 'yang penting kita kaya' dan tidak memperhatikan aspek moralnya. 3). *Tazkia*, artinya nilai kesucian kita sebagai fitrah manusia yang dilahirkan di muka bumi ini yang asalnya tidak memiliki dosa, sehingga dalam aspek pembangunan jangan sampai bersinggungan dengan orang lain, berbuat zalim, atau melakukan transaksi-transaksi berbau ribawi. Itulah tiga konsep yang ada dalam pembangunan Islam, yang membawa tujuan pada kebahagiaan di dunia hingga masuk ke surganya.

KESIMPULAN

Konsep negara pembangunan masih berguna dan memang, sekarang sedang mengalami kebangkitan. Pada saat yang sama, perubahan yang terkait dengan apa yang disebut *Gelombang Ketiga* demokratisasi, telah memberikannya dasar yang lebih aman daripada yang diperkirakan sebelumnya oleh banyak orang. Tetapi membujuk pemerintah, bahkan pemerintah demokratis, untuk menciptakan lembaga yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidaklah mudah.

Pemerintahan demokratis memiliki cakrawala waktu yang sangat singkat dan inti dari pembangunan ekonomi yang efektif adalah alokasi sumber daya untuk jangka panjang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Sebagian negara saat ini menderita *defisit demokrasi* karena mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil menjadi tawanan kekuatan ekonomi di luar kendali mereka (globalisasi). Namun pengalaman negara-negara demokratis bahwa mereka lebih berhasil dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mempertahankan proses pembangunan itu daripada bentuk pemerintahan lainnya. Dengan demikian, untuk menuju keberhasilan, negara berkembang pada awalnya mungkin tidak perlu menjadi negara demokratis, tetapi pada akhirnya harus menjadi negara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aubert, J.-E. (2012). Knowledge economies: A global perspective. In *Intellectual capital for communities* (pp. 74–82). Routledge.
- Calvert, P. (2005). Changing notions of development: bringing the state back in. *Palgrave Advances in Development Studies*, 47–64.
- Castells, M. (2010). Globalisation, networking, urbanisation: Reflections on the spatial dynamics of the information age. *Urban Studies*, 47(13), 2737–2745. <https://doi.org/10.1177/0042098010377365>
- Giddens, A., Bell, D., & Forse, M. (2004). *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Johnson, C. (1999). The developmental state: Odyssey of a concept. *The Developmental State*, 12, 32–60.
- Myrdal, G. (1968). *Asian Drama. Vol. 2: An Inquiry Into the Poverty of Nations*. Pantheon.
- Rahman, M. T. (2018). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*.
- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rostow, W W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge University Press.
- Rostow, Walt Whitman. (1991). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.

Syamsuri, S., & Moka, Z. A.-M. (2021). Strategy of Islamic philanthropy management for economic empowerment at BMH Gerai Ponorogo using SWOT approach. *International Journal of Islamic Business*, 6(1), 59–77.

Weber, M. (2002). *The Protestant ethic and the "spirit" of capitalism and other writings*. Penguin.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).